
**Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan
Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pada Lembaga Teknik Pemerintah Kabupaten Sijunjung**

Sefli Dina Roza¹, Sinarni²

^{1,2}Program Studi Manajemen, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Indonesia

seflidiana@gmail.com

Abstract

The problem of performance accountability of local government agencies in Sijunjung Competence concerns the individual's ability to carry out tasks or make decisions according to The purpose of this study was to determine the effect of job satisfaction and reporting systems on the performance accountability of agencies in the Sijunjung Regency Government Engineering Institute. This research was conducted at the Sijunjung Regency technical institute, which is located at Jalan Muhammad Yamin SH No. 53 Muaro Sijunjung. This type of research uses a descriptive quantitative approach. The sampling technique was carried out by total sampling, as many as 32 people. The results of the Partially, the clarity of budget targets has a positive effect on the t value is greater than the t table, namely $2.204 > 2.042$, and the significant value is $0.036 < 0.05$ and the reporting system has a positive effect, the t value is also greater than the t table, namely $4.002 > 2.042$ and the value is not significant. $0.000 < 0.05$. Based on the F test, it was obtained that the Fcount value was 22.231 and the Ftable value was 3.32. This suggests that simultaneously or simultaneously the clarity of budget targets and the reporting system has a positive effect on the accountability of agency performance in the Sijunjung Regency Government Technical Institution.

Keywords: *Clarity of Budget Objectives, Reporting System and Agency Performance Accountability*

Pendahuluan

Sumber Kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan sendirinya dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil dari program yang dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah. Upaya ini juga didukung oleh banyak pihak baik pemerintah sendiri sebagai lembaga eksekutif, DPR sebagai lembaga legislatif, pers dan juga oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Setiap instansi pemerintahan atau pihak yang diberi mandat dan amanah harus memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang telah dipercayakan kepadanya dengan mengungkapkan segala sesuatu yang dilakukan, dilihat, dirasakan baik yang mencerminkan keberhasilan maupun kegagalan. Dengan kata lain, laporan pertanggungjawaban tersebut bukan sekadar laporan kepatuhan dan kewajaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi termasuk juga kinerja dari pelaksanaan suatu manajemen strategis yang

mampu menjawab pertanyaan mendasar tentang apa yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini instansi pemerintah harus dapat melaporkan keberhasilan yang telah dicapai dan berani mengungkapkan kegagalan yang terjadi berkaitan dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pihak yang lebih tinggi.

Hampir seluruh instansi dan lembaga-lembaga pemerintah mengharuskan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Ketidakmampuan menerapkan konsep akuntabilitas secara konsisten di setiap lini pemerintahan merupakan salah satu penyebab lemahnya organisasi sehingga mengakibatkan munculnya penyimpangan pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia.

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang, yang diawali dari akuntabilitas setiap instansi Pemda termasuk di dalamnya instansi pemerintah Dinas Kabupaten/Kota kepada Pemda. Selanjutnya Pemda membuat akuntabilitas untuk DPRD dan Pemerintah Pusat (Putri, 2015). Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi penerapan akuntabilitas, antara lain adalah pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, kejelasan sasaran anggaran, ketaatan pada peraturan perundang-undangan, akuntabilitas keuangan, pemanfaatan teknologi, motivasi, dan kompetensi. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memper-tanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Pusdiklatwas BPKP, 2011: 2).

Dengan adanya pengendalian akuntansi maka instansi pemerintah dapat mengontrol dan menilai seluruh aktivitas dan tanggung jawab yang dilakukan instansi tersebut. Pengendalian akuntansi dapat menilai apakah kegiatan yang dilaksanakan pemerintah tersebut telah ekonomis, efisien, dan efektivitas pelayanan dari instansi pemerintah daerah kepada masyarakat, ini merupakan salah satu indikator kinerja pemerintah daerah. Tercapainya indikator tersebut merupakan suatu prestasi yang dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang bersangkutan. Maka semakin tinggi pengendalian akuntansi yang diterapkan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah semakin meningkat.

Tinjauan Teori

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban secara periodik (Riantiarno dkk, 2011).

Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 29 tahun 2014 Pasal 1 ayat 14 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memberikan pengertian bahwa akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Mursalini, 2013). Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan visi dan misi instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui seperangkat indikator kinerja (Sumadya dkk, 2014) (Mursalini, 2017).

Kenis dalam Putra (2013) menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung-jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah.

Menurut Suharono dan Solichin (2012) “Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.” Menurut Saputra (2014), agar pengukuran sasaran efektif ada 7 indikator yang diperlukan, yaitu : tujuan, kinerja, standar, jangka waktu, sasaran prioritas, tingkat kesulitan dan koordinasi Menurut Mardiasmo (2015) “Wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah manfaat sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat.”

Agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan sistem pelaporan yang baik. Menurut Zakiyudin & Suyanto (2015), menyatakan bahwa : Sistem pelaporan digunakan untuk memantau hasil kerja yang menunjukkan hasil kerja pusat pertanggungjawaban beserta anggarannya, dimana pelaporan yang baik yakni yang dibuat secara jujur, obyektif, transparan, relevan, tepat waktu dan konsisten memiliki andil besar dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah serta sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan.

Menurut Abdullah dalam Anastasia (2018), menyatakan bahwa : Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan.”

Sesuai dengan perumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kejelasan sasaran anggaran terhadap Akuntabilitas kinerja Instansi di Lembaga Teknik Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sistem pelaporan terhadap Akuntabilitas kinerja Instansi di Lembaga Teknik Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

3. Untuk Mengetahui Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Sistem pelaporan Terhadap Akuntabilitas kinerja instansi di Lembaga Teknik Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

Metode Penelitian

Untuk menunjang pembahasan dalam penulisan ini, penulis memusatkan penelitian di Lembaga teknis Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung yang beralamat di Jalan Muhammad Yamin SH No. 53 Muaro Sijunjung. Sedangkan waktu penelitian diperkirakan pada bulan Januari tahun 2021.

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian Deskriptif Kuantitatif, dimana dalam penelitian ini berusaha untuk mengetahui gambaran secara lebih jelas mengenai Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Sekretariat Daerah Kabupaten Sijunjung Sedangkan bentuk penelitian adalah Penelitian Kausal (sebab akibat) dimana ada variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen.

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, Sugiyono (2012). Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah SKPD yang ada pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung yaitu 8 lembaga teknis daerah. Responden yang dipilih hanya pegawai yang bertugas di bagian keuangan yang terlibat langsung dalam penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang terdiri dari Pengguna Anggaran (PA) 1 orang, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 1 orang, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 1 orang dan Bendahara 1 orang, yaitu :

Tabel 1

Nama Instansi/Lembaga Teknis

No	Instansi/Lembaga Teknis	Jumlah
1	Inspektorat Daerah	4 Orang
2	Sekretariat Daerah	4 Orang
3	Sekretariat Dewan	4 Orang
4	Bappeda	4 Orang
5	BKAD	4 Orang
6	BKPSDM	4 Orang
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	4 Orang
8	Kesbangpol	4 Orang
	Jumlah	32 Orang

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, Sugiyono (2012). Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel dilakukan secara *Total sampling*, yaitu seluruh populasi menjadi sampel penelitian yaitu sebanyak 32 orang.

Hasil dan Pembahasan

Analisis bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen yaitu dari kejelasan sasaran anggaran (X1), sistem pelaporan (X2) terhadap akuntabilitas kinerja instansi (Y). Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan model regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Berdasarkan pengujian menggunakan SPSS versi 22,0 for windows, maka hasil persamaan regresi linier berganda dapat dilihat pada Tabel 4.11

Tabel 3
Hasil Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.636	3.641		2.097	.045
Kejelasan Sasaran Anggaran	.243	.110	.309	2.204	.036
Sistem Pelaporan	.536	.134	.562	4.002	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 22

Berdasarkan Tabel 3 diketahui kolom kedua (*Unstandardized Coefficients*) bagian B diperoleh nilai b1 variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,243, nilai b2 variabel sistem pelaporan sebesar 0,536 dan nilai konstanta (a) adalah 7,636, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 7,636 + 0,243 X_1 + 0,536 X_2 + e$$

Berdasarkan model persamaan regresi linear berganda di atas, maka dapat dianalisis sebagai berikut

- a. Nilai konstanta sebesar 7,636 artinya jika kejelasan sasaran anggaran (X₁), sistem pelaporan (X₂) sama dengan 0 maka akuntabilitas kinerja instansi (Y) sudah ada sebesar 7,636 satuan
- b. Nilai koefisien kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,243 adalah positif. Hal ini menunjukkan kejelasan sasaran anggaran (X₁) terjadi peningkatan 1 satuan dengan asumsi sistem pelaporan (X₂) bernilai tetap atau nol, maka akuntabilitas kinerja instansi meningkat sebesar 0,243 satuan.

- c. Nilai koefisien sistem pelaporan sebesar 0,536 adalah positif. Hal ini menunjukkan sistem pelaporan (X_2) terjadi peningkatan 1 satuan dengan asumsi kejelasan sasaran anggaran (X_1) bernilai tetap atau nol, maka akuntabilitas kinerja instansi meningkat sebesar 0,536 satuan.

Koefisien determinan digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi variabel bebas (kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan) terhadap variabel terikat (pertimbangan tingkat materialitas). Koefisien determinasi (R^2) pada intinya pengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat. *Adjusted R²* berarti R^2 sudah sesuai dengan derajat bebas dari masing-masing jumlah kuadrat yang tercakup di dalam perhitungan *Adjusted R²*. Untuk membandingkan dua R^2 maka harus memperhitungkan banyak variabel X yang ada dalam model. Hasil koefisien determinasi menggunakan *SPSS Statistic 22. for windows* dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4.
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.778 ^a	.605	.578	1.59746

a. Predictors: (Constant), Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 22

Tabel 4 di atas merupakan hasil pengolahan data untuk melihat hasil uji koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini. Diketahui bahwa nilai *R Square* diperoleh 0,605 atau 60,5%. Artinya sekitar 60,5% akuntabilitas kinerja instansi dapat dijelaskan oleh variabel kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan dan sisanya sisanya sebesar 39,5% diterangkan oleh variabel lain seperti perencanaan anggaran, dan sistem pengendalian internal.

Pengujian Hipotesis

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independent secara individual dalam variasi variabel dependent, pengujian dilakukan dengan menggunakan signifance level 0, 05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria:

1. Jika $|t_{hit}| > t_{tabel}$ dan nilai signifikannya $< 0,05$ artinya ada pengaruh atau hubungan signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat maka hipotesis diterima.

2. Jika $|t_{hitung}| < t_{tabel}$ nilai signifikannya $> 0,05$ artinya tidak ada pengaruh atau hubungan yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat maka hipotesis ditolak.

Berdasarkan pengujian menggunakan *SPSS versi 22,0 for windows*, maka hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 5

Tabel 5
Uji Signifikan Parsial (Uji-t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.636	3.641		2.097	.045
Kejelasan Sasaran Anggaran	.243	.110	.309	2.204	.036
Sistem Pelaporan	.536	.134	.562	4.002	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 22

Berdasarkan Tabel 5 didapatkan sebagai berikut :

1. Kejelasan sasaran anggaran (X1) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Lembaga Teknik Pemerintah Kabupaten Sijunjung, hal ini terlihat dari nilai signifikansi $0,036 < 0,05$. Nilai t hitung $2,204 > t$ tabel $2,042$ berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya kejelasan sasaran anggaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Lembaga Teknik Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
2. Sistem pelaporan (X2) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Lembaga Teknik Pemerintah Kabupaten Sijunjung, hal ini terlihat dari nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Nilai t hitung $4,002 > t$ tabel $2,042$ berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya sistem pelaporan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Lembaga Teknik Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

Uji Statistik F untuk mengetahui apakah semua variabel independen atau variabel bebas yaitu variabel kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan secara bersama-sama berpengaruh atau secara simultan terhadap variabel independen atau terikat atau akuntabilitas kinerja instansi. Nilai F hitung akan diperoleh dengan menggunakan bantuan

SPSS versi 22,0 for windows kemudian akan dibandingkan dengan F tabel pada tingkat $\alpha = 5\%$, $(n-k-1 = 32-2=30) = 3,32$. Hasil uji F dapat dilihat pada Tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 6
Uji F
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	113.464	2	56.732	22.231	.000 ^a
Residual	74.005	29	2.552		
Total	187.469	31			

a. Predictors: (Constant), Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran

b. Dependent Variable: Akuntabilitas kinerja instansi

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

Hasil pengujian ANOVA dengan menggunakan uji F pada Tabel diatas memperlihatkan nilai F-hitung sebesar 22,231 dengan Sig adalah 0,000. Dengan mencari pada F-tabel, dengan $df_1 = 2$ dan $df_2 = 30$, diperoleh nilai F-tabel sebesar 3,32. Dengan kondisi dimana F-hitung lebih besar daripada F-tabel ($22,231 > 3,32$) dengan nilai Sig yang lebih kecil dari alpha ($0,000 < 0,05$), maka kesimpulan dapat diambil adalah kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pada Lembaga Teknik Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

Kesimpulan

Pernyataan penutup harus berisi ringkasan dan saran. Ringkasan harus memberikan contoh jawaban yang diberikan untuk hipotesis dan / atau tujuan penelitian atau temuan yang diperoleh. Ringkasan tidak boleh memuat pengulangan hasil penelitian dan pembahasan, melainkan memuat penjumlahan hasil dan temuan penelitian seperti yang diharapkan dalam tujuan penelitian atau hipotesis. Cantumkan keterbatasan penelitian yang mendasari saran penelitian. Saran tersebut hendaknya mempresentasikan hal-hal yang selanjutnya akan dilakukan terkait dengan konsep penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka

Anastasia. (2018). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelapora terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada kabupaten dan Kota di daerah Istimewa Yogyakarta). *KOMPAK*, .13, 37-67.

Anjarwati, M. (2012). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap kauntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Accounting Analysis Journal*, 1(2), 28-48.

- Auditya, L. dan Husaini, L. (2013). Analisis Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Fairness*, 3(1), 21-41.
- Chintya. (2015). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Kota Solok. *Artikel. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Riantiarno. (2011). Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik dan Sistem Pelaporan pada Akuntabilitas Kinerja. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3).
- Suharsono dan Solichin. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*.
- Undang Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang Undang RI No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Zakiyudin dan Suyanto. (2015). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip). *JOM Fekon*, 2(2).
- Mursalini, W. I. (2013). Analisis Pengaruh Perputaran Modal Kerja terhadap Profitabilitas Perusahaan Pada CV. Business Ali Solok. *Manajemen Dan Kewirausahaan*, 4(3), 33–51.
- Mursalini, W. I. (2017). Pertumbuhan Penjualan Dan Laba Usaha Kerupuk Di Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Sumbar. *Jurnal Ilmiah Poli Bisnis*, 9(2), 46–54.